

Hari/Tanggal : Selasa 30 Maret 2021

Waktu : 13.30 Wita – Selesai

**Tempat : Departemen Ilmu Sejarah Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

PESANTREN MAHAD HADIS BIRU DI BONE

TAHUN 1969-1998



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Humaniora Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

OLEH

ERWIN GUTAWA

Nomor Pokok: F811 16 001

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

SKRIPSI

PESANTREN MAHAD HADIS BIRU DI BONE TAHUN 1969-1998

Disusun dan diajukan oleh:

ERWIN GUTAWA

F811 16 001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 30 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Konsultan I

Konsultan II

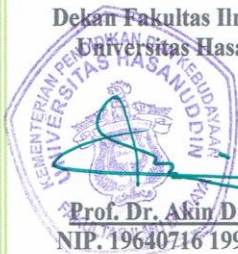
Dr.H.Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum.
NIP. 195712191989031001

Nasihin, S.S., M.A
NIDK. 8834401019

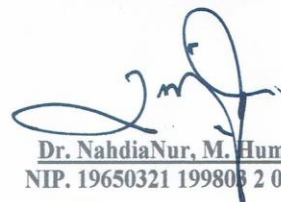
Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010



Dr. Nahdia Nur, M. Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

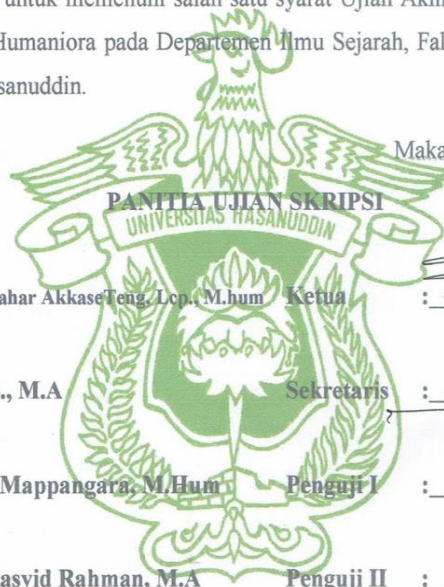
**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**


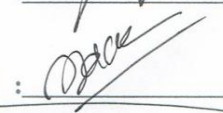
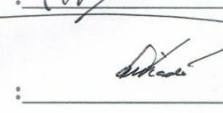
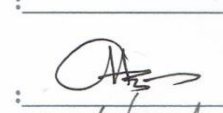
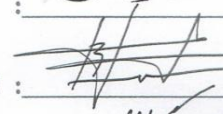
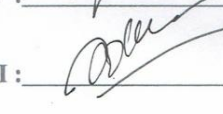
Pada hari Selasa, 30 Maret 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

PESANTREN MAHAD HADIS BIRU DI BONE TAHUN 1969-1998

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Maret 2021



- | | | | |
|--|--------------|---|---|
| 1. Dr. H. Muh. Bahar AkkaseTeng, Lcp., M.hum | Ketua | : |  |
| 2. Nasihin, S.S., M.A | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum | Penguji I | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A | Penguji II | : |  |
| 5. Dr. H. Muh. Bahar AkkaseTeng, Lcp., M.hum | Konsultan I | : |  |
| 6. Nasihin, S.S., M.A | Konsultan II | : |  |

LEMBAR KEASLIHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Gutawa

NIM : F811 16 001

Departemen : Ilmu Sejarah FIB Unhas

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 30 Maret 2021
Yang membuat pernyataan,



Erwin Gutawa
F811 16 001



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, rasul paling mulia dan penutup para Nabi, serta iringan doa untuk keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, ayahanda **M. Isnaeni**, dan ibunda **Wahida** yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti yang tidak pernah lelah mendidik dan membesarkan penulis sehingga menjadi orang yang berguna dan hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maaf jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Juga kepada kakak tersayang **Eliana. S.Pd** dan suaminya **Asmar, Erdianto.S.Pd** dan Istrinya **Rahmawati Mansur.S.Kes**, adikku tercinta **Emil, Eria Safitri** dan suaminya **Muh. Irfan**. Terima kasih atas segala support baik moril, materil serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga segala kebaikan senantiasa menyertai. Serta seluruh keluarga

besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk doanya kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan pernah tercipta tanpa dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang rela memberikan segala bantuan, baik itu bantuan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. Akin Duli, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Nahdiah Nur, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Ilmu Sejarah beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum selaku pembimbing I, terima kasih atas waktu, tenaga, dan arahan yang telah diberikan selama ini dan Bapak Nasihin, M.Hum selaku pembimbing kedua, terima kasih atas waktu, tenaga dan arahan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum selaku penasehat Akademik, terima kasih atas semangat, dan masukan yang telah diberikan selama ini.
6. Bapak Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M. Hum. Drs. A. Rasyid Rahman, M. Ag. Dr. Bambang Sulistyoyo Edi, MS., Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D. Drs. Dias Pradadimara, M.A., Dr. Ilham, M.Hum., Ibu A. Lili Evita, M.Hum., Bapak Dr. Muslimun AR

Effendy, M.S., Nasihin. M.A., dan seluruh staf dosen pengajar Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai ilmu berkaitan dengan studi sekaligus membina semasa perkuliahan.

7. Bapak Udjie Usma, S.Sos, selaku kepala kesekretariatan yang selama ini banyak membantu penulis dalam mengurus berkas-berkas kuliah yang dibutuhkan selama penulis menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah.
8. Seluruh dosen dan staf di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
9. Bapak dan ibu yang telah bersedia untuk saya wawancarai dan memberikan informasi menyangkut sekrip ini, bapak Drs. H. Jamaluddin A. Mth.I selaku Pimpinan Pondok, bapak Dr. KM. Muslihin Sultan M.Ag selaku Wakil Pimpinan Pondok, bapak Dliyauddin Huzaifah S.H.I selaku Sekertaris Pondok, Ustadz H. Syamsuddin S.H.I., M.Pd.I, Kepala Unit Sarana dan Prasaran Pondok, Bapak Drs. Ansari, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Ibu Mastati Suhardi. S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Madrasah Aliyah.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Ilmu Sejarah. Arizal, Hendra, Akang, Isman, Burhan, Rahmadi, Rais, Arul, Zul, Alle, Arafah, Alam, Erwin S, Ammar, Sinar, Erni, Jusni, Ben, Ega, Kiki, Intan, Tati, Selvi, Dewi, Dian, Fitri, Eve Siska, Nisa.

11. Teman Pengurus UKM Karate-Do Unhas 2019. Sadila, Lina, Farid, Sandi, Dian, Dewi, Abdi, Wasti, Nisa, Afdal, kk Alifiah, Uga, Grace, Jusni, Ida, Pita, Citra, Dita.
12. Teman KKN Tematik Pengelolaan Lingkungan Pesisir Sinjai Gelombang 102. Izzwan, Kk Imam, Indar, Palli, Trisya, Erni, Rasni, Dana, Jusra, Anya, Vira, Fani, Rara.
13. Teman Kos. Ramly dan Ardi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik.

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum
Wrahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 30 Maret 2021

Erwin Gutawa

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
LEMBAR KEASLIHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABTRACT ...	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Tinjauan Pustaka	15
1.7. Sistematika Penulisan	19
BAB II Gambaran Umum Kabupaten Bone	21
2.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone	21
2.2. Kondisi Geografis Kabupaten Bone	28
2.3. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Bone	30
2.4. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bone.....	32
2.5. Islam di Kabupaten Bone.....	33

BAB III. Faktor-Faktor Berdirinya Pesantren Mahad	
Hadis Biru	42
3.1. Awal Munculnya Pendidikan Islam di Kabupaten Bone.....	42
3.2. Situasi Politik di Kabupaten Bone	47
3.3. Posisi dan Peran Militer di Kabupaten Bone	51
3.4. Proses Pembangunan Pesantren Mahad Hadis Biru.....	53
3.4.1.Perkembangan Pesantren Mahad Hadis Biru	57
3.4.2.Lembaga pendidikan di pesantren Mahad Hadis	
Biru	61
3.4.3.Metode pengajaran dan pendidikan Pendidikan	
Pesantren Mahad Hadis Biru.....	61
3.4.4.Pengaruh Berdirinya Pesentren Mahad Hadis Biru	
Terhadap Masyarakat Sekitar	64
BAB IV. Sistem Pendidikan Tradisional Yang Masih di Pertahankan	
di Pesantren Mahad Hadis Biru	69
4.1. Biografi <i>Anre Gurutta</i> K.H. Muhammad Junaid Sulaiman	69
4.2. Kitab-Kitab Yang Diajarkan di Pesantren Mahad Hadis	
Biru	73
4.3.Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Membaca Kitab	
Kuning di Pesantren Mahad Hadis Biru	84
4.4.Metode yang Digunakan Guru dalam Pembelajaran	
Kitab Kuning.....	87
4.5.Keadaan Santri di Pesantren Mahad Hadis Biru	89
BAB V Kesimpulan Dan Saran	95
5.1. Kesimpulan	95
5.2. Saran	97
Daftar Pusataka.....	98
Daftar Informan	106
Lampiran	107

DAFTAR ISTILAH

Istilah Bahasa Bugis

Ade pitue	: Hadat Tujuh
Ade	: Adat
Anaarung	: Bangsawan
Anreguru	: Seseorang yang memiliki keilmuan dalam bidang agama
Ata	: Budak
Bicara	: Sistem hukum
Kadhi	: Pejabat resmi keagamaan tertinggi kerajaan sekaligus penasehat penguasa dalam persoalan keagamaan
Katte	: Khatib
Kessi	: Pasir
Laleng Bata	: Dalam Benteng
Mangaji kitta	: Pengajian Al-Quran dan kitab kuning
Mangaji tudang	: Mengaji sambil duduk didepan guru
Mappalaiseng	: ketentuan-ketentuan yang mengatur perbedaan
Musu Selleng	: Musu Islam
Palili	: Kecamatan

Pangngedereng : Suatu yang menjadi tempat berpijak perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis

Pone : Bone

Rapang : Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan

Sara: Syariat Islam

Saoraja : Istana Raja

To Maradeka : Merdeka

Watang : Pusat

Tomarilaleng : Perdana Menteri

Istilah Bahasa Asing

Asisten Residen : Pegawai negeri tertinggi di afdeling pada masa penjajahan Belanda

Boarding School : Sekolah dengan tinggal di asrama atau perpaduan antara persekolahan dengan dunia pondok pesantren

Controleur : Jabatan pemerintah di Indonesia pada masa Hindia Belanda

Full Day : Sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar dilakukan mulai pukul 06.00-15.00 dengan durasi istirahat seriap dua jam sekali.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GESTAPU	: Gerakan 10 September
GOLKAR	: Golongan Karya
K.H.	: Kiai Haji
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KODAM	: Komando Daerah Militer
LAPAS	: Lembaga Perasyarakatan
MDI	: Majelis Dakwah Islamiyah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PDF	: Pendidikan Diniyah Formal
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
RI	: Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

UKS : Usaha Kesehatan Sekolah
YASPEM : Yayasan Pesantren Modern
YASLAM : Yayasan Syiar Islam

ABSTRAK

Erwin Gutawa, dengan judul “Pesantren Mahad Hadis Biru Di Bone Tahun 1969-1998”, dibimbing oleh Dr. H. Muhammad Bahar Akkase Teng, LCP., M.Hum. dan Nasihin, S.S., M.A.

Penelitian ini membahas tentang Pesantren Mahad Hadis Biru sebagai pendidikan Islam di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Pesantren Mahad Hadis Biru didirikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendiriannya dan bagaimana Pesantren Mahad Hadis Biru mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional di dalam lingkungan sistem pendidikan nasional yang modern. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber primer berupa arsip dan data wawancara. Sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan tesis.

Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa faktor-faktor berdirinya Pesantren Mahad Hadis Biru diawali pengajian Al-Quran dan pengajian kitab kuning yang dibuka oleh *Anregurutta* K.H. Muhammad Junaid Sulaiman di Masjid Raya Watampone, beberapa faktor pendukung adalah peran pemerintah, partai Golkar dan militer dalam proses pembangunan Pesantren tersebut. Tahun 1982-1987 Pesantren Mahad Hadis Biru membuka sistem pendidikan modern, menerapkan model pembelajaran *full day*, *boarding scholl* dan *life skill*, menggunakan kurikulum Departemen Agama, Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, dan Pesantren. Meskipun Pesantren Mahad Hadis Biru membuka sistem pendidikan modern, tetapi sistem pendidikan tradisionalnya masih dipertahankan yaitu *Qismul Huffadz* (Penghafal Al-Quran) dan pengajian kitab kuning.

Kata Kunci : Mahad Hadis Biru, Pemerintah, Partai Golkar, Militer, Pendidikan Modern, Pendidikan Tradisional.

ABSTRACT

Erwin Gutawa with the title "Mahad Hadith Blue Islamic Boarding School in Bone 1969-1998", supervised by Dr. H. Muhammad Bahar Akkase Teng, LCP., M. Hum. and Nasihin, S.S., M.A.

This study discusses about Mahad Hadith Blue Islamic Boarding School as Islamic education in Bone Regency. This study aims to know why Mahad Hadith Blue Islamic Boarding School was established and what factors influenced the process of its establishment and how Mahad Hadith Blue Islamic Boarding School could survive as the traditional educational institution in a modern national educational system environment. The sources used in this study are primary sources in the form of archives and interview data. Secondary sources are books, journals, articles, essays and theses.

The results of this study show that the factors in the establishment of Mahad Hadith Blue Islamic boarding school were begun by the Al-Quran recitation and yellow book recitation which was opened by *Anregurutta* K.H. Muhammad Junaid Sulaiman at Watampone Grand Mosque, several supporting factors are the government role, Golkar party and the military in the process of the Islamic boarding school establishment. In 1982-1987, Mahad Hadith Blue Islamic boarding school opened a modern educational system, implemented a full day learning model, boarding school and life skills, using the Ministry of Religion Curriculum, National Education and Culture, and Islamic Boarding Schools. Although Mahad Hadith Blue Islamic boarding school opens a modern educational system, but its traditional education system is still maintained, namely *Qismul Huffadz* (Al-Quran memorizer) and yellow book recitation.

Keywords: Mahad Hadith Blue, Government, Golkar Party, Military,

Modern Education, Traditional Education.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Model pendidikan berbasis Agama Islam yang cukup mengakar dalam masyarakat di nusantara adalah pesantren.¹ Model pendidikan ini mengalami perkembangan cukup signifikan, dari masa pra-Islam, hingga kemudian menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan yang berbasis Agama Islam di Indonesia. Bagi sebagian pemikir Islam di Indonesia, model pendidikan pesantren seringkali dianggap mengadopsi konsep Mandala, yakni sebuah konsep pendidikan yang dilakukan dengan cara melingkar dan terfokus pada satu titik di tengah-tengah.²

Seiring perkembangan zaman, kendati model pendidikan modern (Pendidikan formal) telah dikembangkan di Indonesia, model pendidikan pesantren masih diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sehingga pesantren masih bertahan hingga sekarang sebagai model pendidikan informal.³

¹ Abdurrahman Wahid. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS,

² Mandala berasal dari kata Sansekerta yang berarti lingkaran. Selengkapnya lihat. Heinz Frich. *Arsitektur dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 42-44.

³ Poesponegoro, Marwati Djoened dkk. *Sejarah Nasional Indonesia V-cet.-2 Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 302.

Secara fisik, pesantren direpresentasikan sebagai sebuah lingkungan pendidikan Islam berbasis asrama. Para murid atau pelajar tinggal dan menetap secara bersama-sama di bawah naungan seorang guru yang akrab disebut kiai.⁴ Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, mereka akrab disebut sebagai *Anreguru* (bugis), *Anrongguru* (Makassar).

Tujuan awal dari sistem pendidikan pesantren adalah melahirkan ahli agama Islam. Tujuan tersebut berikutnya direpresentasikan melalui pola-pola pengajaran yang berorientasi terhadap peningkatan pengamalan Agama Islam bagi para santri. Melalui orientasi tersebut, harapan besar dari sistem pendidikan pesantren adalah terbentuknya santri atau peserta didik yang memiliki pengetahuan tentang Islam, yang berikutnya dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, ketika para santri tersebut kembali ke masyarakat.⁵

Sebagai sistem pendidikan yang lebih berorientasi dalam pembentukan karakter (ke-Islam-an), maka materi-materi yang diajarkan, tentunya yang berkaitan dengan materi-materi yang berbasis pengetahuan Islam. Beberapa materi penting yang dimaksud adalah: Ilmu Tajwid, fiqh, tasawuf, akhlaq, hadits, alat, dll.

⁴ Mohammad Iskandar. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*. MATABANGSA, 2001, hlm. 91.

⁵ Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS: Jakarta, 1994, hlm. 6.

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan pesantren semakin mendapatkan tantangan yang cukup berarti dari sistem pendidikan formal yang secara langsung ditentukan oleh pemerintah. Kondisi demikian berakibat pada semakin menurunnya capaian pembelajaran pesantren, terkait dengan luaran yang dihasilkan. Pesantren yang semula lebih berbasis pengetahuan Agama Islam dan berorientasi terhadap pembentukan moralitas, semakin tergeser pada hasil luaran dari sistem pendidikan formal yang justru berorientasi pada dunia kerja.

Pada konteks inilah, maka kementerian agama yang memiliki kedekatan secara ideologis dalam proses pengembangan Agama Islam, berikutnya melakukan perbaikan terhadap orientasi dari sistem pendidikan pesantren. Proses peningkatan mutu pendidikan pesantren diawali ketika KH Wahid Hasyim didaulat sebagai pimpinan Departemen Agama. Ia menawarkan ide pembaharuan dengan merekonstruksi tujuan pembelajaran di pesantren, yang semula pesantren diarahkan untuk melahirkan ahli agama (ulama atau kiai) menjadi tenaga kerja yang bisa bersaing di dunia kerja ⁶

Proses perubahan orientasi dari sistem pendidikan pesantren, pada akhirnya mendorong pada perubahan model pembelajaran yang terjadi di pesantren. Salah satu model pembelajaran yang mengalami perubahan adalah sistem *sorogan* dan *bandongan* yang semula menjadi model pembelajaran paling umum dalam dunia pesantren, mengalami perubahan dengan

⁶*Ibid.*,

menerapkan sistem klasikal. Perlu digarisbawahi, bahwa sistem klasikal, bukan berarti baru dilaksanakan seiring dengan proses “modernisasi” sistem pendidikan pesantren yang diinisiasi oleh KH Wahid Hasyim, akan tetapi model pembelajaran klasikal pada dasarnya sudah diterapkan oleh KH. Ahmad Dahlan ketika membuka ruang-ruang belajar Agama Islam pada awal abad ke-20 di Yogyakarta. Begitu juga sebaliknya, sistem klasikal yang telah menjadi bagian penting dalam model pembelajaran di pesantren, bukan berarti telah menggantikan sepenuhnya model pembelajaran sebelumnya.⁷

Pada konteks inilah, masing-masing pesantren, berikutnya menginisiasi dirinya sendiri untuk menentukan terhadap model pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pada tahap ini, dalam dunia pesantren, mengalami perubahan cukup signifikan sebagai bagian dari lembaga pendidikan.

Sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan pesantren, maka para pengasuh pesantren mencoba lebih adaptif terkait dengan tantangan zaman yang semakin praktis. Bentuk adaptasi sistem pendidikan pesantren yang adalah adanya penerapan sikap “mempelajari sambil mencontoh”. Salah satu bukti terhadap penerapan sikap dalam pengembangan pendidikan pesantren adalah penerapan sistem klasikal, perbaikan kurikulum, serta model pembelajaran yang lebih jelas, yang

⁷Sistem *halaqah* adalah sistem menghafal teks-teks berbahasa Arab, juga cara menyampaikan pelajaran diberikan secara berkelompok dalam satu lingkaran, tidak jauh berbeda dengan kelompok pengajian. Lihat Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, Matabangsa, 2001, hlm. 96.

sebelumnya telah dilakukan oleh sistem pendidikan modern yang diterapkan oleh Belanda di Hindia Belanda.⁸

Sebagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, bahwa sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Berbeda halnya dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah cenderung tidak berjenjang dan berkesinambungan.⁹ Merujuk pada pengkategorian sistem pendidikan tersebut, maka model pendidikan pesantren dikategorikan sebagai sistem pendidikan luar sekolah.

Kendati demikian, sistem pendidikan pesantren tidaklah stagnan. Pada dasarnya, sistem pendidikan pesantren telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari sistem tata kelola tempat tinggal, kurikulum, klasifikasi bakat dan minat, hingga perjenjangan referensi, telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan pesantren.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

⁹ Lihat Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Ayat 1, 2 dan 3.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 41-42.

Kendati demikian, tidak semua pesantren melakukan peningkatan terhadap sistem pendidikan tersebut. Perkembangan sistem pendidikan pesantren tidak terpusat, masing-masing pesantren berdiri sendiri sebagai lembaga pendidikan yang otonom. Mereka mengembangkan model pembelajarannya masing-masing, mulai dari penyelenggaraan proses belajar mengajar, kurikulum, hingga sistem pengajaran lainnya.

Secara umum, terdapat beberapa elemen penting terkait dengan model pembelajaran pesantren. Beberapa elemen yang dimaksud diantaranya adalah: tersedianya pondok atau tempat tinggal para santri. Tersedianya kitab-kitab atau referensi sebagai modal utama dalam melangsungkan pembelajaran. Terdapat tempat peribadatan, baik masjid maupun mushollah. Seorang kiai yang dibantu oleh para guru, serta santri, sebagai anak didik yang siap mendalami ilmu pengetahuan agama dalam lingkungan pesantren tersebut.¹¹

Salah satu karakteristik yang sangat lazim dari model pendidikan pesantren adalah pondok, yakni sebuah bangunan asrama sebagai tempat tinggal para santri. Bentuk dan tipe bangunan dapat bermacam-macam, tergantung bagaimana orientasi pesantren tersebut dibuat dan diselenggarakan. Pondok umumnya terletak tidak berjauhan dengan masjid dan rumah kiai. Terkait dengan keletakan pesantren, tidak ada aturan secara khusus dalam hal tersebut. Kondisi ini lebih mengacu pada konteks dasar atau orientasi dasar dari pesantren tersebut didirikan dan difungsikan.

¹¹ Mastuhu. *Op.Cit.*, hlm. 6.

Merujuk pada unsur utama pendirian pesantren adalah pengembangan Agama Islam, sehingga unsur tersebut menjadi acuan dasar dalam proses penentuan keletakan pesantren yang dimaksud. Konteks keletakan pesantren tidak ditentukan atas keruangan di dalam atau di luar kota, akan tetapi lebih berorientasi pada unsur dasar dalam pembentukan pesantren tersebut.

Komplek pesantren di pulau Jawa umumnya berada di luar kota, bahkan banyak yang dibangun di pinggiran desa, dalam arti di luar pemukiman penduduk yang sudah ada sebelumnya. Di beberapa daerah, seperti di daerah Sukabumi, ada juga pesantren yang sejak masa kolonial telah berdiri di dalam kota.¹²

Termasuk di Sulawesi Selatan, orientasi keletakan pesantren menyebar pada titik-titik pengembangan Islam. Seperti halnya pada Pesantren Mahad Biru di Bone. Pesantren ini berada di luar pusat keramaian Kabupaten Bone, akan tetapi tepat berada di pusat pengembangan Islam dalam lingkungan sekitar. Pusat perkembangan Islam umumnya ditandai dengan bangunan Masjid atau tempat peribadatan. Seiring perkembangan zaman, pola keletakan pesantren semakin kompleks, tidak hanya mengacu pada orientasi dasar pembentuka pesantren, akan tetapi juga didasarkan pada ketersediaan lahan untuk mendesain pesantren yang diinginkan. Ketersediaan lahan dan kepemilikan lahan, kini menjadi bagain penting, sehingga secara logis, pola keruangan pesantren-pesantren berada di luar pemukiman utama penduduk.

¹² Mohammad Iskandar. *Op.Cit.*, hlm. 91.

Bagian penting dalam pesantren adalah santri. Mereka menjadi unsur penting dalam proses belajar mengajar. Menurut Iskandar, santri dalam pesantren dapat dikategorikan menjadi dua golongan. Pertama adalah *santri mukim*, yaitu santri yang menetap di pesantren dalam jangka waktu tertentu (umumnya relatif lama). Mereka inilah yang merupakan salah satu inti kehidupan pesantren. Kedua adalah *santri kalong*, yaitu para santri yang tidak menetap di kompleks pesantren, namun secara rutin mengikuti pelajaran yang diselenggarakan pihak pesantren. Kebanyakan dari para *santri kalong* ini berasal dari penduduk kampung atau desa sekitar pesantren tersebut. Para santri inilah yang secara tidak langsung menjadi penghubung kiai dengan penduduk kampung luar pesantren dan sekaligus menjadi semacam alat promosi kiai dan pesantrennya.¹³

Banyak studi tentang sistem pendidikan pesantren mengesankan adanya keunikan tersendiri sebagai lembaga pendidikan. Keunikan pesantren itu semakin bertambah kuat dalam pandangan masyarakat karena kemampuannya untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi bahkan memiliki kemampuan adaptasi dan daya tahan terhadap perubahan sosial. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi terhadap pendidikan Agama Islam, maka pesantren terus mengembangkan model dan sistem pendidikannya menjadi lebih baik. Dalam Bahasa yang berbeda, lebih kompetitif terhadap model pendidikan lainnya.

¹³*Ibid.*, hlm. 92-93.

Dalam konteks kekinian, luaran pesantren tidak lagi hanya berfokus pada mencetak alumni yang mampu berdakwah dalam arti sederhana, yakni berceramah, akan tetapi melampaui hal tersebut, yakni membimbing para santri menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu hidup pada kondisi sosial apapun, termasuk dapat terserap dalam dunia kerja. Konteks pengembangan sistem dan model pendidikan pesantren ini, juga menjadi bagian penting dari proses perkembangan pesantren Mahad Hadis Biru di Kabupaten Bone.

Pesantren ini melihat bahwa kebutuhan masyarakat saat ini sangat kompleks, mulai dari kebutuhan pendidikan, ekonomi, hingga kebutuhan tersier lainnya. Sebagai upaya untuk menjangkau kebutuhan dalam masyarakat tersebut, maka Pesantren Mahad Biru juga mencoba merumuskan program-program yang lebih aplikatif bagi para santri yang telah menetap di pesantren ini. Program pendidikan yang ditawarkan oleh Pesantren Mahad Biru diantaranya adalah: Tahfiz Al-Quran (penghafal Al-Quran) dan program *lifeskill*, salah satunya dengan program keterampilan menjahit, unit pengembangan bahasa dengan program pidato tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris dan Arab.¹⁴

¹⁴ Dliyauddin Huzafah S.H.I. Sekertaris Pondok Pesantren Ma'had Hadis Biru, Kabupaten Bone, wawancara, 22 Juli 2020, di Bone.

Pada konteks inilah, Pesantren Mahad Biru mengalami dinamika yang cukup kompleks dalam proses perkembangannya hingga sekarang. Merujuk dari Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tulisan ini mencoba untuk melihat lebih dalam tentang dinamika pendidikan pesantren di era menjamurnya pendidikan modern. Sebagai upaya untuk menganalisis persoalan yang ingin dikaji, maka penelitian ini berikutnya dikemas melalui penelitian yang berjudul: *Pesantren Mahad Hadis Biru Di Bone Tahun 1969-1998*.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini bertujuan untuk membatasi masalah-masalah yang akan di bahas agar tidak terlalu luas cakupannya karena terbatasnya sumber. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan uraian yang akan di bahas oleh penulis yakni, batasan temporal (waktu) dan spasial (ruang) dari judul yang telah di pilih.

Batasan temporal dalam penelitian ini yaitu pada tahun 1969-1998. Penulis mengambil periode ini karena tahun 1969 merupakan tahun di berdirinya Pesantren Mahad Hadis Biru, pada tahun 1970 di temukan lokasi pendirian Pesantren yang berlokasi di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang 2 km dari ibu kota Kabupaten, berdasarkan Akte Notaris Nomor 43 Tahun 1970. Pada tanggal 18 Maret 1973 Pesantren Mahad Hadis Biru diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan. Pada tahun 1982-1987 Pesantren Mahad hadis Biru membuka sistem pendidikan modern yaitu Raudhatul Athfal, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

dan penulis mengambil batasan akhir tahun 1998 karena pada tahun ini merupakan peristiwa dimana pergantian era Orde Baru ke era Reformasi, sehingga kebijakan dan peraturan akan mengalami perubahan. Pada era Orde Baru pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, berbeda di era Reformasi memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mengelola pendidikan.

Ruang lingkup spasial atau tempat yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Bone. Wilayah ini dipilih sebagai ruang lingkup tempat yang akan dikaji karena ingin mengetahui mengapa Pesantren Mahad Hadis Biru didirikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses berdirinya, dan bagaimana Pesantren Mahad Hadis Biru mampu mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya ditengah berkembangnya sistem pendidikan nasional yang modern.

1.3. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pesantren Mahad Hadis Biru didirikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendiriannya?
2. Bagaimana Pesantren Mahad Hadis Biru mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional di dalam lingkungan sistem pendidikan nasional yang modern.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses berdirinya Pesantren Mahad Hadis Biru dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendiriannya
2. Untuk mengetahui sejauh mana Pesantren Mahad Hadis Biru mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional di dalam lingkungan sistem pendidikan nasional yang modern.

1.4.2. Manfaat Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang proses berdirinya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pendiriannya Pesantren Mahad Hadis Biru.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana Pesantren Mahad Hadis Biru mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional di dalam lingkungan sistem pendidikan nasional yang modern.

1.5. Metode Penelitian

dalam melakukan penelitian, setiap penulis selalu menggunakan metode dalam meneliti. Begitupun dalam penelitian mengenai Pondok Pesantren Mahad Hadis Biru di Bone Tahun 1969-1998. Prosedur yang harus dilakukan dalam metode penelitian sejarah meliputi 4 tahap yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber), (2) verifikasi (kritik sumber, kredibilitas

sumber), (3) Interpretasi (analisis dan sintesis), dan (4) Historiografi (penulisan hasil penelitian).¹⁵

Pada tahap pertama penulis melakukan *pengumpulan sumber* (Heuristik), baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Pada tahap ini pencarian sumber yang dilakukan oleh penulis yaitu kunjungan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di JL. Perintis Kemerdekaan KM.12 No.146, Tamalanrea, kota Makassar, seperti adanya arsip Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. serta Menteri Agama R.I. Suratkeputusan bersama No. 0299/U/1984, Nomor 45 Tahun 1984 tanggal 28Juni 1984 tentang pengaturan pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Menteri Agama R.I., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, serta Menteri Dalam Negeri R.I. : Surat Keputusan bersama Nomor 6 Tahun 1975, NO. 037/U/1975, Nomor 36 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Kunjungan ke Pesantren Mahad Hadis Biru di JL. Jenderal Sudirman, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Seperti adanya Arsip Akte Notaris Nomor 43 Tahun 1970, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pesantren Mahad Hadis Biru. Serta adanya sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, skripsi dan tesis yang membahas tentang judul ini. Sumber sekunder ini diakses dari berbagai situs internet, perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UNHAS dan kalau itu belum cukup akurat maka penulis melakukan

¹⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003).

wawancara kepada tokoh-tokoh yang ada di pondok pesantren yaitu Drs. KM. H. Jamaluddin Abdullah A. Mth.I, Dr. KM. Muslihin Sultan M.Ag, Dliyauddin Huzaifah, S.H.I, Drs. Ansari, S.Pd.I., M.Pd.I dan Mastati Suhardy, S.Ag., M.Ag.

Pada tahap yang kedua yaitu verifikasi, setelah seluruh sumber-sumber primer dan sekunder dikumpulkan, maka akan dilakukan kritik sumber. Kritik sumber ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mana yang sesuai dengan judul yang telah ditentukan oleh penulis dan juga pemilihan sumber yang paling relevan untuk digunakan. Aspek yang dikritik pada tahap ini yaitu tentang keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi yang ada pada data yang telah didapatkan. Kritik sumber diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal dan kritik internal, dalam kritik eksternal peneliti melihat kembali misalnya arsip tersebut asli atau tidak, dengan melihat arsip tersebut memperhatikan tahun dan ejaan yang digunakan pada saat arsip itu dibuat. Sedangkan kritik internal peneliti melakukan penelitian dengan cara membandingkan arsip yang tidak digunakan dalam penelitian namun sezaman dengan arsip yang kita gunakan dalam penelitian.

Pada tahap yang ketiga yaitu *interpretasi*, di tahap ini dilakukan analisis secara ilmiah terhadap informasi yang telah didapatkan. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul telah melalui tahapan verifikasi kemudian ditafsirkan dengan menggunakan teori dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini.

Dalam tahap yang terakhir yaitu *Historiografi* dilakukan perangkuman semua hasil analisis kedalam tulisan ilmiah secara kronologis berdasarkan data-data dan fakta yang ada. Tahap ini memerlukan imajinasi historis yang baik, sehingga fakta-fakta sejarah yang sudah benar-benar terpilih tetapi masih bersifat fragmentasi dapat menjadi suatu sajian yang utuh.

1.6. Tinjauan Pustaka

Setiap melakukan penelitian, penulis pasti menggunakan metode dalam penulisan karya ilmiah. Begitupun dengan penelitian mengenai Pondok Pesantren Mahad Hadis Biru di Bone Tahun 1969-1998. Untuk itu, penulis menggunakan tiga metode dalam pengumpulan sumber, yaitu metode studi pustaka, studi arsip dan sumber sejarah lisan. Berikut identifikasi mengenai studi pustaka dalam penelitian Pondok Pesantren Mahad Hadis Biru di Bone Tahun 1969-1998.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai bahan acuan utama dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

Buku *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potrek Perjalanan* karya Nurcholis Madjid diterbitkan pada tahun 1997 di Jakarta oleh penerbit Pramadina Dalam buku tersebut penulis menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi pesantren pada masa sekarang dengan merumuskan kembali tujuan pendidikan pesantren. Di antara rumusan tersebut adalah menjaga tradisi Islam dan

sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman yakni pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁶

Buku *Pondok Pesantren Dan Perubahan Sosial: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren*, karya Babun Suharto Tahun 2018 di terbitkan oleh Pustaka Ilmu. Dalam kehidupan sosial keagamaan pesantren menjadi pusat tumpuan masyarakat dalam mendidik anak-anak. Umat menginginkan anaknya menjadi seorang yang berilmu sekaligus mempunyai akhlak dan kesalehan¹⁷

Buku *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Karya Prof. Dr. Mujamil Qomar. M.Ag Tahun 2005 di Jakarta oleh penerbit Erlangga. Pertumbuhan pesantren sejak awal hingga sekarang telah melahirkan kategori tradisional dan modern. Istilah tradisional dan modern dipengaruhi waktu, system pendidikan, juga dipengaruhi cirri khasnya. Sebab hingga sekarang ini masih banyak bentuk-bentuk pesantren tradisional dan modern.¹⁸

Buku *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Karya Mastuhu Tahun 1994 Jakarta oleh penerbit INIS. Dinamika sistem pendidikan pesantren ialah gerak perjuangan pesantren di dalam memantapkan identitas dan kehadirannya

¹⁶ Nurcholis Madjid. *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potrek Perjalanan*. Jakarta: Pramadina, 1997.

¹⁷ Babun Suharto. *Pondok Pesantren Dan Perubahan Sosial: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

¹⁸ Mujamil Qomar. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.

di tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang membangun ini, sebagai subsistem pendidikan nasional¹⁹

Buku *Manajemen Pondok Pesantren*, Karya Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo Tahun 2003 Jakarta oleh penerbit Diva Pustaka. Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan formal, beberapa pesantren mengalami perkembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan administrasi pengelolaan keuangan. Perkembangan ini di mulai dari perubahan gaya kepemimpinan pesantren: dari karismatik ke rasionalistik, dari otoriter-paternalistik ke diplomatic-partisipatif, atau dari *laissez faire* ke demokratik.²⁰

Buku *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Dan Pesantren*, karya Ahmad Mutohar, Nurul Anam Tahun 2013 Yogyakarta oleh penerbit Pustaka Pelajar. Modernisasi pendidikan Islam merupakan salah satu ujung tombak dari proses modernisasi dala sebuah bangsa, termasuk juga bangsa Indonesia. Namun, hal itu harus diimbangi oleh sector-sektor lain agar modernisasi pendidikan tidak mandul. Jadi, sebagai usaha untuk merancang model-model modernisasi pendidikan selama tenggang waktu ntertentu untuk meransang modernisasi di sector lain, maka reformasi dan transformasi yang diusung dalam tema-tema pada saat ini, tidak lain untuk memodernisasikan pendidikan di Indonesia.²¹

¹⁹ Mastuhu. *Op.Cit.*,

²⁰ Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003).

²¹ Ahmad Mutohar, Nurul Anam. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Dan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Buku *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, Karya Abu Hamid Tahun 1976 yang diterbitkan oleh Monografi Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta Buku tersebut berisi tentang system pendidikan pesantren dan tingkat-tingkat pertumbuhan pendidikan pesantren.²²

Buku, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Karya Zamakhsyari Dhofier Tahun 1982 yang diterbitkan oleh LP3ES Jakarta Buku tersebut berisi Ciri-ciri Umum Pesantren, Elemen-elemen Sebuah Pesantren, Hubungan Intelektual dan Keekerabatan sesama Kyai, Profil Pesantren di Abad XX, Kyai dan Tarekat, Faham Ahlusunnah Wal-jamaah dan Kyai dalam Situasi Indonesia Sekarang.²³

Skripsi Pondok Pesantren Minahilil Ulum DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang 1976-2000, yang ditulis oleh Arsyad tahun 2007. Skripsi ini berisi tentang Proses berdirinya, perkembangan system pendidikan pesantren Minahilil Ulum DDI Kaballangan²⁴

²²Abu Hamid. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Monografi Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1976.

²³Zamakhsyari Dhofier. *Op.Cit.*,

²⁴Arsyad. *Pondok Pesantren Minahilil Ulum DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang 1976-2000*. Skripsi. Makassar: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas sastra Universitas Hasanuddin, 2007.

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk memberi suatu gambaran yang utuh dan jelas, serta mencapai hasil yang maksimal, maka perlu perencanaan yang benar-benar matang. Perencanaan itu terwujud antara lain dengan mensistematiskan antara satu bab dengan bab yang lain agar memiliki keterkaitan secara sistematis dan logis. Penyajian penelitian ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar bab-bab selanjutnya. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bab ini memberi gambaran umum tentang seluruh rangkaian penelitian sebagai dasar pijakan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi Gambaran Umum Kabupaten Bone, adapun Sub pembahasannya adalah Sejarah Singkat Kabuapten Bone, Kondisi Geografis Kabupaten Bone, Kondisi Sosial Budaya Kabuapten Bone, Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Bone dan Islam di Kabupaten Bone.

Bab III berisi factor-faktor berdirinya Pesantren Mahad hadis Biru di Bone sebagai pendidikan Islam di Kabupaten Bone, adapun sub pembahasannya adalah Pendidikan Islam di Kabupaten Bone, Situasi politik di Bone, posisi dan peran militer Bone, Proses pembangunan Pesantren

Mahad Hadis Biru, Perkembangan Pesantren Mahad Hadis Biru, Lembaga-lembaga pendidikan Pesantren Mahad Hadis Biru, metode pengajaran dan pendidikan di Pesantren Mahad Hadis Biru dan pengaruh berdirinya Pesantren Mahad hadis Biru terhadap masyarakat sekitarnya.

Bab IV berisi Sistem pendidikan tradisional yang masih dipertahan di pesantren Mahad Hadis Biru, adapun sub pembahasannya adalah Biografi *Anre Gurutta* K.H. Muhammad Junaid Sulaiman Pendiri Pesantren Mahad Hadis Biru, kitab-kitab yang diajarkan di Pesantren Mahad Hadis Biru, Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Membaca Kitab Kuning, dan Keadaan Santri di Pesantren Mahad Hadis Biru.

Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai jawaban atas persoalan dalam penelitian ini. Sedangkan saran dalam ini berisi tentang saran-saran setelah penelitian dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BONE

2.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Sebelum kita membahas panjang lebar sejarah Bone ini, langkah baiknya kita mengetahui dahulu asal kata penamaan Bone. Sebelum Watampone berkedudukan sebagai pusat Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, masyarakat Bone dan sekitarnya telah menyebutnya sebagai kota Watampone. Nama Watampone berasal dari dua kata, yaitu watang (pusat) dan pone berarti Bone. Nama itu muncul setelah ditaklukkannya Kerajaan Bone oleh Belanda pada tahun 1905-1906, dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Belanda.²⁵

Menurut A. Muh Ali, bahwa nama Bone diambil dari nama jenis tanah kuning bercampur pasir yang didalam bahasa Bugis dinamakan Bone atau *kessi* yang terdapat di Bone. Sebelum disebut Watampone daerah yang beradah didalamnya disebut Bone sesuai dengan nama Kerajaan. Setelah wilayah kekuasaan raja Bone semakin luas, maka dibangunlah benteng untuk melindungi ibu kota kerajaan sekaligus pertahanan. Karena wilayah Kerajaan Bone ini berada didalam benteng, maka selanjutnya ibukota disebut *Laleng Bata* (didalam Benteng).²⁶

²⁵ A. Muh Ali. *Bone Selayang Pandang*, Watampone: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone. 1986, hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*,

Perlawanan Rakyat Bone terhadap Belanda pada tahun 1905, dikenal dengan nama *Rumpuna Bone*. Pada masa pemerintahan Raja Bone ke-33 Lapawowoi Karaeng Sigeri bersama putranya Petta Ponggawae. Menunjukkan kepahlawanannya dalam perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Pendaratan tentara Belanda secara besar-besaran beserta peralatan perang yang sangat lengkap, hal ini dilakukan dengan tujuan utamanya di Bajoe untuk menaklukan Kerajaan Bone. Namun sebelum semua pasukan tentara Belanda berkumpul di Bajoe, mereka sebagian besar singgah di Bulukumba untuk mengkonsolidasi strategi mereka dalam penyerangan secara terpadu kepada Kerajaan Bone.²⁷

Pemerintah Belanda mengirim sebuah surat kepada Raja Bone, sementara menunggu balasan surat dari Raja Bone, tentara Belanda melakukan pengintaian untuk menentukan lokasi pendaratannya. Namun mereka memutuskan mendarat di Ujung Pattiro. Setelah kurang seminggu berada di Pattiro, mereka memutuskan untuk menarik kembali pasukannya, dan kini mengalihkan perhatiannya di wilayah Bajoe.²⁸

Selama kurang lebih lima bulan (Juli-November 1905) Daeng Marola senantiasa mendampingi Lapawowoi Karaeng Sigeri bersama Petta Ponggawae melakukan perlawanan dengan taktik gerilya secara berpindah-pindah, mulai dari Palakka, Pasempe, Gottang, Lamuru, dan Citta di daerah Soppeng hingga ke pusat pertahanan terakhir Bulu Awo (perbatasan Siwa

²⁷Suriadi Mappangara, *Efek Domino: Rumpa'na Bone*, Makassar: Laboratorium dan Budaya Unhas. 2018, hlm. 266.

²⁸ *Ibid.*,

dengan Tanah Toraja), tempat gugurnya Petta Ponggawae. Pada tanggal 30 Juli 1905, tentara Belanda berhasil merebut Saoraja (Istana Raja) di Watampone dan menjadikan sebagai basis pertahanannya.

Pada saat peperangan itu, Lapawowoi Karaeng Sigeri (Raja Bone pada masa itu) dikalahkan, sehingga wilayah Kerajaan Bone dikuasi oleh Belanda. Istilah *Rumpuna Bone* berasal dari pernyataan Lapawowoi Karaeng Sigeri sendiri, ketika menyaksikan secara langsung Petta Ponggawae gugur diterjang peluru tentara Belanda. Setelah Lapawowoi Karaeng Sigeri melihat putranya Petta Ponggawae gugur, dengan segera memerintahkan pasukannya untuk segera menemui Kolonel Van Loenen supaya pertempuran dihentikan. Lapawowoi Karaeng Sigeri kemudian ditangkap dan dibawa ke Pare-Pare setelah jenazah Petta Ponggawae dikuburkan. Dari Pare-Pare, Lapowowoi Karaeng Sigeri kemudian dibawa ke Ujung Pandang dan selanjutnya diasingkan ke Bandung Jawa Barat, sedangkan permaisuri beserta keluarganya semua dikembalikan ke Bone.²⁹ Pada tanggal 11 November 1911 Lapawowoi Karaeng Sigeri meninggal dunia di Jakarta, maka dinamakan dia MatinroE ri Jakarta. Pada tahun 1976 dia dianugerahkan sebagai Pahlawan Nasioanl.

²⁹Muhammad Rapi Tang, *Tolok Rumpakna Bone*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2000, hlm. 10.

Sepeninggal panglima Perang Petta Ponggawae, laskar-laskar Kerajaan Bone terpencar-pencar. Meski perlawanan masih terus berjalan terutama laskar-laskar yang berada di wilayah Selatan Kerajaan Bone dibawah komando, Latemmu Page Arung Labuaja. Namun kian hari stamina lascar-laskar Kerajaan Bone semakin menurun sementara serdadu Belanda terus menyisir pusat-pusat pertahanan.

Sejak setelah itu, pemerintahan Hindia Belanda ingin segera merealisasikan keinginannya Kerajaan Bone diminta membuka pintu untuk kerja sama, dengan cara mengakui pengalihan hak pajak impor dan ekspor diperairan Kerajaan Bone dengan kompensasi. Mereka juga menempatkan aparat Belanda untuk menjalankan pemungutan pajak pada waktu itu³⁰

Pada masa penjajahan Belanda di Bone, kota Watampone tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Watampone yang tadinya dibentuk pada masa Raja Bone ke-1, oleh penjajah Belanda, di tata kembali yang tentunya disesuaikan dengan kepentingan penjajah. Untuk kepentingan penjajahannya itulah maka pusat kota di jadikan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang Belanda dan pusat kegiatan pemerintahan.³¹

³⁰ Suriadi Mappangara. *Op.Cit.*, hlm. 5.

³¹Oktriana. *Ritual Mabbedda'Bola pada masyarakat Bugis di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 36.

Bone sebagai daerah jajahan Belanda diberi kesempatan untuk mengatur administrasi secara pemerintahan sendiri, yang dibantu oleh hadat tujuh (*ade pitue*), sementara dari pemerintahan Belanda dipimpin oleh seorang *Controleur* atau *Asisten Residen*. Dengan demikian terjadi dualisme pemerintahan di Bone, dimana satu pihak *Controleur* sebagai pengendali tertinggi, pihak lain ada *Tomarilaleng* (Perdana Menteri) sebagai pejabat Pribumi.³²

Ade Pitue merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan Kerajaan Bone yang terdiri 7 orang yaitu:

1. ARUNG UJUNG, bertugas mengepalai urusan penerangan Kerajaan Bone.
2. ARUNG PONCENG, bertugas mengepalai urusan kepolisian atau kejaksaan.
3. ARUNG TA, bertugas mengepalai urusan pendidikan dan perkara sipil.
4. ARUNG TIBOJO, bertugas mengepalai urusan perkara atau pengadilan Landaschap/hadat besar dan mengawasi urusan perkara pengadilan Distrik
5. ARUNG TANETE RIATTANG, bertugas mengepalai memegang kas Kerajaan, mengatur pajak, dan mengawasi keuangan.

³²Sahajuddin. *Mengenal Bone Hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014, hlm. 60.

6. ARUNG TANETE RIAWANG, bertugas mengepalai pekerjaan negeri (Landaschap Werken-L W) pajak jalan pengawas Opzichter.
7. ARUNG MACEGE, bertugas mengepalai pemerintahan umum dan perekonomian.³³

Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang, kedudukan Raja Bone dipertahankan, bahkan menjadi anggota Dewan Pemerintahan, untuk merumuskan kebijaksanaan yang akan diterapkan oleh pemerintahan Jepang dalam pembangunan dan penguasaan wilayah Sulawesi, saat itu Andi Mappanyukki menjadi Raja Bone ke-32 (1931-1946), sementara kota Watampone tetap dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sampai pada masa kemerdekaan.

Sebagai konsekuensi proklamasi 17-08-1945, sistem pemerintahan monarki konstitusi dihapuskan menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar dari nilai-nilai luhur kepribadian Bangsa Indonesia itu sendiri, seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah dimasa pemerintahan Ir Soekarno, hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan dicoba lagi dengan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, ini pun ternyata belum selesai.

³³A. Muh Ali. *Op.Cit.*, hlm. 73.

Kemudian Era Reformasi, uji coba perubahan tentang mekanisme Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 dilakukan untuk mencari bagaimana bentuk dan wujud Demokrasi Pancasila yang murni, seperti yang terdapat dalam UUD 1945 itu, yang berakar dari kebudayaan serta nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita selalu melihat contoh Demokrasi Barat atau Negara-negara lain, bisa-bisa kita kembali mengalami masa kegelapan yang dialami masyarakat Bone sebelumnya, atukah masa kegelapan seperti yang dialami putra mahkota pewaris Kerajaan Bone, Latenri Tatta Toa Pattunru Arung Palakka pada waktu baginda masih berusia dua belas tahun.³⁴

Pada bulan Mei 1950, untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk, dan berdiri awal abad ke-XIV tahun 1330, terjadi suatu demokrasi rakyat di kota Watampone yang menuntut dibubarkan Negara Indonesia Timur, dihapuskannya pemerintahan Kerajaan dan menyatakan berdiri dibelakang Pemerintah RI. Pada tanggal 21 Mei 1950 terbentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Bone. Setelah pelantikan KNI maka terjadilah peristiwa penyerahan kekuasaan legislative dari pemerintahan Kerajaan kepada KNI, dan beberapa hari kemudian para anggota hadat tujuh mengajukan permohonan berhenti.³⁵

³⁴ Sahajuddin. *Op.Cit.*, hlm. 37.

³⁵ Suriadi Mappangara. *Op.Cit.*, hlm. 310.

2.2. Kondisi Geografis Kabupaten Bone

Secara geografis Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Selatan yang paling luas dibandingkan dengan daerah lainnya dengan memiliki garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Untuk menuju daerah ini dapat ditempuh dalam waktu 4 jam perjalanan roda empat dengan jarak tempuh 174 km dari kota Makassar. Kabupaten Bone adalah salah satu dari tiga bekas kerajaan utama di Sulawesi Selatan yang letaknya di pantai teluk Bone di pinggir timur jazirah Sulawesi Selatan, yang pada zaman *To ManurungngE* hanya seluas kurang lebih 5 km² secara administratif wilayah Kabupaten Bone terletak pada batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Soppeng dan Wajo. Sebelah Timur dengan teluk Bone. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Sinjai dan Gowa Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Maros, Pangkep, dan Barru.

Kota Watampone sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang terletak dipesisir Timur wilayah Sulawesi Selatan dan bagian Barat Teluk Bone dengan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Disamping memiliki luas wilayah yang relatif luas, secara astronomis kota Watampone terletak dalam posisi 04-13 Lintang Selatan sampai 05-06 Lintang Selatan dan 119-42 Bujur Timur sampai 120-40- Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa yang menjadikan Kabupaten Bone beriklim Tropis dan posisinya berada di pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559,06 km² atau 9,92 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kabupaten terbesar yang terdiri dari 27 wilayah kecamatan meliputi 333 desa dan 39 kelurahan.³⁶ Tiga kecamatan diantaranya di wilayah perkotaan Watampone yaitu Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur.

Di teluk Bone dengan batas-batas sebagai Berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Watampone, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Barebbo, sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone dan Sebelah Barat Berbatasan dengan kecamatan Palakka.

Luas kota Watampone adalah 12,635 Ha yang mencakup 3 kecamatan yaitu kecamatan Tanete Riattang, kecamatan Tanete Riattang Barat dan kecamatan Tanete Riattang Timur, dengan 24 kelurahan atau desa yang dibagi menjadi 10 bagian wilayah kota. Dari ke-3 kecamatan yang ada di wilayah kota Watampone masing-masing mempunyai luas dan jarak dari ibukota Kabupaten. Ke-3 kecamatan di Watampone masing-masing terdiri dari 8 desa atau kelurahan³⁷

Di wilayah kota Watampone terdapat beberapa sungai, baik sungai kecil maupun sungai besar yang sebagian besar masih dalam pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Daerah setempat. Sungai-sungai tersebut ada yang dimanfaatkan keperluan untuk perikanan, pertanian, dan juga sumber air bersih. Kedudukannya cukup strategis karena pada posisi yang paling mudah

³⁶Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Proyeksi Penduduk Tahun Dasar 2015.

³⁷*Ibid.*,

dan efisien. Khususnya untuk lintasan hubungan antara Provinsi Daerah tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan.³⁸

2.3. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Bone

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bone masih terikat dengan aturan-aturan adat dan hal-hal yang kramat dan sacral, yang secara keseluruhan tercangkup dengan *pangngadereng*, yang terdiri dari *Ade*, *Bicara*, *Rapang*, *Wari* dan *Siri*.

Pangngadereng berasal dari kata *Ade* dalam bahasa Bugis yang artinya adat. Dengan demikian *Pangngadereng*, berarti suatu yang menjadi tempat berpijak perilaku dan kehidupan masyarakat Bugis. Khususnya di Bone *Pangngadereng* merupakan tumpuan tradisi yang sudah lama ada.

Ade (adat) merupakan sistem norma dan aturan-aturan adat yang berfungsi mendinamisasi seluruh aspek kehidupan masyarakat Bugis. Selain itu, untuk mencegah perbuatan yang sewenang-wenang oleh orang-orang kuat dan melindungi orang-orang yang lemah.

Bicara adalah sistem adat orang Bugis yang mengatur segala aktivitas maupun konsep yang berkaitan dengan peradilan. Unsure ini mengandung aspek-aspek normative dalam mengatur tingkah laku setiap orang, atau badan hukum untuk berinteraksi secara timbale balik.

³⁸Herlinda. *Kota Watampone pada Priode Pra Induktif*, Skripsi, Makassar: Fakultas Sastra Unhas Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 11.

Rapang berarti contoh, persamaan, perumpamaan, dan kias.

Wari atau biasa disebut ketentuan-ketentuan yang *Mappalaiseng*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur perbedaan dari segala sesuatu menurut semestinya (ketentuan-ketentuan yang mengatur perbedaan) *Wari* kekerabatan misalnya, yaitu tata tertib yang yang menentukan garis keterunan dan ketentuan sehingga melahirkan strata sosial yang disebut *Anaarung* (Bangsawan), *To Maradeka* (Merdeka) dan *Ata* (Budak)

Siri dalam pengertian bahasa atau harafiahnya adalah sama dengan rasa malu, tetapi jika dipandang dari makna budaya atau kulturenya, maka kata *Siri* akan bermakna kehormatan, harga diri atau martabat. Bagi masyarakat Bugis Bone, pengertian makna kulturenya dari kata *Siri* itulah yang lebih menonjol dalam kehidupan sehari-hari, apabila ia menyebut kata *Siri*. Sebab asensi kata *Siri* adalah soal malu yang erat kaitannya dengan kehormatan diri, harga diri sebagai seseorang manusia.

Unsur-unsur kepercayaan lama seperti sesaji, pemujaan pada roh-roh gaib, pemeliharaan tempat-tempat, upacara turun kesawa atau mendirikan rumah atau benda-benda milik kerajaan yang merupakan hal yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Bugis Bone. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Bone masih tetap bertahan sesuai dengan tatanan norma-norma yang telah mengakar dalam masyarakat. Namun demikian berubah dan perkembangan zaman seiring dengan perkembangan Pendidikan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berpengaruh kehidupan masyarakat Bugis

Bone. Akan tetapi pergeseran-pergeseran yang terjadi masih tetap menampakkan identitasnya, sehingga berbeda dengan masyarakat yang lain.

2.4. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Bone

Struktur sosial sebagai kesatuan dari beberapa sistem dalam masyarakat sekaligus menjadi pola tingkah laku dalam masyarakat sebagai identitas, khususnya pada suatu daerah. Terbentuknya pelapisan sosial dalam suatu masyarakat bersumber dari usaha masyarakat untuk mengatur dirinya dalam suatu kesatuan. Dalam kelompok masyarakat tradisional, elit masyarakat berpusat pada kelompok keluarga dari ketua atau pimpinan masyarakat.

Penggolongan yang dimaksud adalah berdasarkan fungsi dan peranan dalam masyarakat bahwa pembagian lapisan sosial yang melibatkan mereka. Terciptanya golongan-golongan menurut lapisan penghidupan yang dipilihnya atau dasar anggapan-anggapan dan kesadaran pada norma-norma sosial yang berlaku, maka pembagian tersebut terdiri atas:

Lapisan to sugi adalah orang-orang pengusaha, pedagan, dan wirausaha atau mereka yang memiliki sarana ekonomi, lapisan to panrita adalah orang-orang baik dari kalangan To Deceng dan anak Arung yang menjadi cendikiawan, ahli agama dan orang berilmu lainnya, lapisan to Mapparenta (pejabat pemerintah) yang menjalankan pemerintahan, lapisan to Biasa (orang kebanyakan) yang terdiri dari golongan orang-orang yang bekerja sebagai buruh, tukang becak dan sektor informasi kota.

2.5. Islam di Kabupaten Bone

Dalam H. j. de Graff terdapat tiga cara proses Islamisasi di nusantara, ialah lewat perdagangan, dakwah sufi serta politik.³⁹ Dari ketiga proses tersebut, Islamisasi Kerajaan Bone diantaranya melalui politik. Dalam sejarah awal penerimaan Islam di Kerajaan Bone, dimulailah perang antara Kerajaan Gowa serta sekutunya dengan Kerajaan Bone yang diketahui dengan istilah *Musu Selleng*. Dalam peristiwa itu Kerajaan Bone hadapi kekalahan, mendesak para penguasa serta masyarakat Bone memeluk Islam serta menjadikannya agama resmi kerajaan.

Pada tahap awal penyebaran Islam di kerajaan Bone, ajaran syariat Islam serta ilmu kalam bersumber dari ajaran Khatib Tunggal Dato ri Bandang. Raja Bone kala itu yang awal memeluk agama Islam ialah La Tenri Pale To Akkapeang Sultan Abdullah tahun 1611- 1626 M, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Raja La Tenri Pale Sultan Abdullah berangkat ke Gowa untuk belajar agama Islam dari Dato ri Bandang serta pula urusan kenegaraan.⁴⁰ Sehingga penyebaran ajaran syariat Islam cuma pada area kerajaan serta para bangsawan Kerajaan Bone.

³⁹ H.J. de Graff. *Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18*. Dalam Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982, hlm. 2.

⁴⁰ Mattulada. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998, hlm. 200-201.

Sehabis kematian Raja La Tenripale Akkapeang Sultan Abdullah, *Ade Pitue* mengangkut La Madaremmeng Sultan Muhammad Shalih selaku Raja Bone ke- 13 dari tahun 1632- 1640 M. La Madaremmeng dipandang sebagai Raja Bone yang sangat aktif mengembangkan Islam di Kerajaan Bone.⁴¹ Pemerintahan Raja La Madaremmeng mengeluarkan kebijakan memberantas keyakinan lama (pra-Islam) serta berupaya menghapuskan sistem perbudakan (*ata*). Kedua wujud kebijakan tersebut dimaksudkan buat menegakkan hukum Islam. Tetapi kebijakan tersebut tidak diterima oleh warga Bone, paling utama golongan bangsawan, termasuk ibunya sendiri, We Tenrisoloreng.⁴²

Bagi penulis, perlawanan yang dicoba oleh bangsawan serta warga Bone terhadap kebijakan Raja La Maddaremmeng, sebab perbudakan sudah jadi budaya di Kerajaan Bone serta kerajaan yang lain dan budak mempunyai kelebihan serta arti tertentu untuk pemiliknya. Sehingga untuk memberantas budaya perbudakan tersebut timbul perilaku penolakan terhadap bangsawan serta warga. Sebagaimana dikemukakan Sartono, dalam proses akulturasi ditemui indikasi yang sama, ialah terdapatnya spektrum alterasi perilaku budaya yang ditunjukkan, mulai dari penolakan, perundingan, sampai penerimaan penuh.⁴³

⁴¹Ridhwan. *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta Peran Kadi*. Aceh: Unimal Press, 2016, hlm. 27.

⁴²Dalam catatan Andi Muhammad Ali disebutkan bahwa, namanya We Tenrisoloreng dan mempunyai gelar Makkalarue Datu Pattiro. Lihat Andi Muhammad Ali. *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁴³Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Ilmu Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 160.

Pada masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng dibentuk seorang pejabat syariah (*parewa sara*) di Kerajaan serta dimasukkan dalam aspek *panngadereng* sehingga mendapat wujud konkrit yang sangat intensif serta diaplikasikan secara merata serta menyeluruh kepada tiap muslim. Petugas Sara (*parewa sara*), dibentuk dari *Kadhi* (kalie) sampai pejabat bawahan, terdiri dari anggota keluarga *arumpone* (raja Bone). Sebab itu, pejabat sara pula mendapat gelar bangsawan, semacam *Petta Kalie*, *Petta Imang* serta sebagainya. *Petta* merupakan istilah untuk orang yang mulia.⁴⁴

Kadhi merupakan pejabat agama resmi kerajaan serta pula penasihat dalam permasalahan agama. *Kadhi* mempunyai kewenangan untuk mengetahui penerapan *sara* serta berhak campur tangan dalam memutuskan hal-hal tertentu. Ruang lingkup kewenangan utamanya merupakan perkawinan, perceraian, kematian, serta warisan yang cocok dengan hukum Islam, serta pula mempunyai kewenangan buat mengendalikan urusan upacara keagamaan, semacam maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Fitri serta Idul Fitri. Adha.⁴⁵

Kebijakan penghapusan perbudakan pada masa pemerintahan Raja La Mederemmmeng membuat para bangsawan, rakyat termasuk ibunya menentang serta melarikan diri untuk meminta pertolongan kerajaan Gowa, sehingga terjadi perang antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bone. Dalam

⁴⁴Mattulada. *Agama Islam di Sulawesi Selatan: Laporan proyek penelitian peranan Ulama dan Pengajaran Agama Islam di Sulawesi Selatan*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang: 1976, hlm. 54.

⁴⁵Ahmad Ridha. *Islamisasi Kerajaan Bone: Suatu Tinjauan Historis*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin. Makassar 2013, hlm. 87.

pertempuran ini kerajaan Bone ditaklukkan dan La Maderemmeng jadi tawanan kerajaan Gowa, Kerajaan Bone diperintah oleh Kerajaan Gowa selama tujuh belas tahun.

Dalam Lontara Attoriolong ri Bone dijelaskan bahwa selama tujuh belas tahun Kerajaan Bone diperintah oleh Kerajaan Gowa. Hingga akhirnya Arung Palakka Petta Malampee Gemmena dengan bantuan Kompeni Belanda dibawah pimpinan Laksamana Speelman berhasil merebut kembali tahta Kerajaan Bone. Pertempuran Kerajaan Gowa melawan Kerajaan Bone yang dibantu Kompeni Belanda diakhiri dengan perjanjian Bungaya, pada tanggal 18 November 1667 M.⁴⁶ Raja La Tenritatta To Appatunru Petta Malampee Gemmena Arung Palakka Sultan Saaduddin Raja Bone ke-15 dari 1669-1696 M dipandang memiliki peran dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone.

Mattulada dalam bukunya mengatakan bahwa setelah Kerajaan Bone memisahkan diri dari kekuasaan Gowa dan Arung Palakka Sultan Saaduddin menjadi *Arumpone* (Raja Bone), Arung Palakka memfungsikan kembali secara efisien *pangnadereng* yang di dalamnya terdapat *sara* dengan kelengkapan para pengurusnya (*parewa sara*). Pada masa La Tenritatta, dengan bantuan Kompeni Belanda, dapat dikatakan bahwa seluruh Sulawesi Selatan berada di bawah penguasaannya atau setidaknya-tidaknya di bawah

⁴⁶*Ibid.*, hlm 89. Mengutip dalam, anonim, Lontara Attoriolong ri Bone, hlm 15. *toboen riplao at rimksea, nsEpulo pitu taun jEn tobl npeawai toboen*. To Bone ripallao ata' rimangkasae naseppulo pitu taunna jennang tobala napaewai to Bone. Terjemahan bebas: Orang Bone menjadi ata' (dikuasai) oleh Gowa, selamah tujuh belas tahun, Jennang dan Tobala memerintah di Bone.

pengaruhnya.⁴⁷ Mubalig atau ulama lebih leluasa mengembangkan dakwah Islam ke negeri Bugis-Makassar, karena batas-batas kerajaan yang sebelumnya saling bermusuhan lama kelamaan menjadi tidak lagi menjadi penghalang penyebaran agama Islam.

Sepeninggal Arung Palakka, Raja La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris pada tahun 1696-1714 M diangkat menjadi Raja Bone ke-16 sebagai pengganti pamannya pada tanggal 6 April 1696 M.⁴⁸ Ketika La Patau Matanna Tikka meninggal dan dimakamkan di Nagauleng (Daerah Kecamatan Cenrana, Bone Utara) sehingga diberi gelar *Matinroe ri Nagauleng*. Dan menduduki tahta Kerajaan Bone selama 18 tahun 1696-1714 M dan menjadi Datu Soppeng ke-18 selama 3 tahun 1701-1711 M dan menjadi *Renreng Tuwa* di Kerajaan Wajo.⁴⁹

Saat itu, Kerajaan Bone sebagai penguasa di Sulawesi Selatan, Raja La Patau Sultan Alimuddin Idris menjadikan ajaran Islam sebagai pengikat persatuan dan kesatuan anggota masyarakat, serta antar kerajaan. Ini juga karena selain sebagai Arumpone, ia juga seorang Datu di Soppeng dan *Ranreng Ruwa* di Kerajaan Wajo. Perannya dalam Islamisasi di Kerajaan

⁴⁷Mattulada. *Op.Cit.*, hlm. 200.

⁴⁸Andi Palloge. *Sejarah Kerajaan Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir*. Gowa:Yayasan Al Muallim, 2006, hlm. 153

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 158.

Bone dan kerajaan lainnya, La Patau dibantu oleh seorang Khadi Bone bernama Syaikh Ismail.⁵⁰

Syekh Ismail sebagai *Khadi* kedua di Kerajaan Bone menjadi guru bagi masyarakat Bone dan Arumpone itu sendiri. Tak butuh waktu lama, Raja La Patau Matanna Tikka telah menguasai beberapa ilmu agama sehingga diberi gelar Sultan Alimuddin (orang yang tahu agama). Pada masa pemerintahannya *Langgar* atau *Mushallah* didirikan di tengah-tengah pemukiman penduduk, selain berfungsi sebagai tempat peribadahan juga digunakan sebagai tempat pendidikan. Dalam proses Islamisasi pada masa itu dikaitkan dengan upacara-upacara Islam yang berkaitan dengan siklus kehidupan (*cycle life ceremony*).⁵¹

Pada masa pemerintahan Raja La Patau Matanna Tikka, dasar-dasar ajaran Islam telah menyebar dan menyatu dengan masyarakat Bugis. Sejak saat itu, muncul ungkapan dalam bahasa Bugis yang mengatakan *tenna ugi kotenna selleng* (bukan orang Bugis kalau bukan Muslim). Nilai-nilai ajaran Islam menjadi pedoman hidup masyarakat Bugis.

⁵⁰Abu Hamid. *Upaya Penyiaran Islam dalam Islamisasi di Kerajaan Bone*, Majalah Wawasan STAIN Watampone, edisi perdana, 1998. hlm. 23. Syaikh Ismail adalah seorang ulama, dan beliau adalah anak dari kadhi pertama Bone yang bernama Fakih Amrullah atau cucu Sultan Abdullah Awwalul Islam. Beliau kawin dengan keluarga dekat La Patau. Diangkat menjadi Kadhi sejak La Tenritatta dan menjabat selama 40 tahun.

⁵¹Ahmad Ridha. *Op.Cit.*, hlm. 91.

Pada masa pemerintahan Raja La Patau Matanna Tikka, Islam berkembang pesat dengan masuknya tasawuf. Ajaran tarekat yang dikenal saat itu adalah Tarekat al-Wujudiyah, tarekat ini sampai di Bone dan dipelajari oleh para bangsawan Bone. Hal ini terbukti ketika Raja La Patau Sultan Alimuddin Idris meminta Abdul Basir Tuan Rappang, santri dan Khalifah Khalwatiyah Syekh Yusuf di Sulawesi Selatan untuk menulis buku *Daqaiq al-Asrar (berisi tawajjuh, muraqabah, musyahadah, muhadarah, dan mu'ayanah)* (Adib Misbachul Islam, 2008: 207).

Islam berkembang pesat pada masa Raja La Patau Matanna Tika, memperoleh momentum ketika Raja Bone ke-22 naik tahta, yaitu Raja La Temmassonge Menjabat Sultan Abdul Razak Jalaluddin Matinroe ri Malimongeng tahun 1749-1775 M. Raja La Temmassonge To Appaweling didampingi oleh dua orang Kadi Bone, yaitu Daeng Malengu, Kadi Bone ke-6 dan La Cendrana, Kadi Bone ke-7. La Temmassonge To Appaweling dikenal untuk merestorasi Masjid Al-Mujahidin di Kerajaan Bone.⁵² Pada masa pemerintahannya, pengajian Alquran tumbuh subur, bahkan selama bulan Ramadhan ia kerap mengundang santri (sebutan untuk anak-anak atau remaja yang sedang belajar mengaji) datang ke istananya untuk mengadakan pengajian.⁵³

⁵²Ridhwan. *Op.Cit.*, hlm. 31. Mengutip dalam *Lontara Bilang Raja Bone La Temmassonge*, trj. Asmad Riady Lamallongeng, *Catatan Harian Raja Bone La Temmassonge*. Makassar: Lamacca, 2007. hlm. 48.

⁵³ *Ibid.*, mengutip dalam *Lontara Bilang Raja Bone La Temmassonge*, hlm. 60.

Dalam perkembangan selanjutnya, Islamisasi di Kerajaan Bone semakin kuat dengan munculnya seorang raja yang bisa juga dikatakan sebagai seorang ulama yaitu Raja La Tenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin Matinroe ri Rompegading dari tahun 1775-1812 M. Raja La Tenritappu adalah seorang yang setia. Pengikut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah yang didapatnya melalui salah satu santri Syekh Yusuf yaitu Abdul Qahir al-Darir atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Rappang I Wodi.

Raja La Tenritappu didampingi oleh *Khadi* ke-8 Bone Arab Harun. Bersama Arab Harun, La Tenritappu berkunjung dan tinggal di Maros untuk memperdalam ilmu tasawuf melalui tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. La Tenritappu menulis dalam bahasa Arab dua kitab tasawuf sesuai dengan ajaran tarekatnya, yaitu *Nur al-Hadi ilaa Tariqi al-Rasyaadi dan Siraaj al-Qalbi*.⁵⁴ Selain itu, Arab Harun diketahui telah menyalin banyak buku tasawuf yang ditinggalkan oleh Syekh Yusuf dan muridnya Sheikh Abdul Qahir al-Darir atau Tuan Rappang I Wodi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Kerajaan Bone semakin meningkat pada saat itu.⁵⁵

Pada paruh kedua abad ke-19, Singkeru Rukka, Sultan Ahmad Idris, Raja Bone ke-28, naik tahta pada tahun 1860-1871 M. Raja Singkeru Rukka didampingi oleh dua orang *Khadi* yaitu KH. Adam *Khadi* Bone ke-9 dan KH. Safiyanah *Khadi* Bone ke-10. Singkeru Rukka juga dikenal sebagai orang yang shalih dan praktisi tarekat, yaitu *tarekat Khalwatiyah Sammaniyah*.

⁵⁴Abu Hamid. *Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, hlm. 218.

⁵⁵Nabilah Lubis. *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari; Menyingkap Intisari Segala Rahasia* Bandung: Mizan, 1996, hlm. 64.

Tarekat ini didapat dari Syekh Abdul Munir Syamsul Arifin pada tahun 1820 M. Sejak remaja, Raja Singkeru Rukka merantau ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan belajar tarekat dari Syekh Idris Ibnu Usman, murid Syekh Abdul Samad al-Palembangi.⁵⁶

Perkembangan Islam di Kerajaan Bone semakin kuat, terutama perkembangan pendidikan Islam, ketika Raja Bone ke-32 naik tahta yaitu La Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe ri Gowa dari tahun 1931-1946 M. Raja Mappanyukki didampingi oleh *Khadi* Bone ke-12 KH. Abdul Hamid pada tahun 1914-1942 M. Ada dua sumbangan terbesar Raja La Mappanyukki bagi perkembangan pendidikan Islam di Bone, yaitu yang *pertama* bersama *Khadi* Bone KH. Abdul Hamid membangun Madrasah Amiriyah Islamiyah pada tahun 1933 M, dan *Kedua* membangun Masjid Raya Watampone pada tahun 1940 M dan selesai pada tahun 1942 M. Masjid ini digunakan sebagai pusat pendidikan Islam di Kerajaan Bone, di samping Masjid Al-Mujahidin.⁵⁷

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Raja Bone (*Arungpone ri Bone*) dan *Khadi* (*Petta Kalie ri Bone*) untuk memperkuat Islam sebagai keyakinan dalam aspek kehidupan masyarakat Bone. Pada tahun 1950 Kerajaan Bone mengakhiri bentuk kerajaannya dan berubah menjadi sebuah kabupaten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵⁶ Abu Hamid. *Op.Cit.*, hlm. 218.

⁵⁷ Ridhwan. *Op.Cit.*, hlm. 33.